

BAB II

KERANGKA TEORI/KERANGKA KONSEP

2.1 Penelitian Terdahulu

Sebelum memasuki pembahasan mengenai penelitian ini, ada baiknya bagi kita untuk melihat secara kritis penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan lima jurnal penelitian terdahulu sebagai referensi dan acuan. Penelitian terdahulu memiliki peranan penting dalam memberikan landasan yang kuat dan perspektif yang mendalam bagi penelitian-penelitian baru. Dengan memperhatikan penelitian-penelitian terdahulu ini, diharapkan peneliti dapat mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan yang masih perlu dijelajahi, serta menemukan potensi untuk mengembangkan kerangka konseptual dan metodologi baru dalam penelitian ini.

Penelitian terdahulu pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh M. Raihan Taruna dan Ratna Permata Sari pada tahun 2022. Penelitian difokuskan pada perbedaan kelas social yang direpresentasikan dalam film *Crazy Rich Asians*. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah Film sebagai Realitas Sosial, Kelas Sosial, dan Analisis Resepsi Audiens Stuart Hall. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis resepsi audiens.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa mayoritas responden sependapat bahwa perbedaan kelas sosial berpengaruh pada beberapa aspek kehidupan, seperti tradisi pernikahan, pendidikan, kekayaan, dan latar belakang keluarga. Walaupun begitu, sebagian responden menolak ide memilih pasangan berdasarkan latar belakang mereka. Responden yang sedang dalam tahap negosiasi mengalami kesulitan dalam menentukan keputusan terkait aspek budaya, latar belakang pasangan, dan jabatan. Perbedaan latar belakang responden memengaruhi cara mereka menafsirkan pesan-pesan dalam film tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa elemen-elemen seperti budaya, kekayaan, pendidikan, dan pekerjaan memiliki peran yang signifikan dalam cara kelas sosial dipahami terhadap film "*Crazy Rich Asians*".

Penelitian terdahulu kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Destaria Verani Soe'oad dan Prudensius Maring pada tahun 2020. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan resepsi penonton wanita dari karakter utama Ji Sun Woo dalam drama Korea berjudul *The World of The Married*, dengan menggunakan teori penerimaan Stuart Hall dan teori Standpoint. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi dan pemaknaan atas karakter Ji Sun Woo oleh para informan berada di posisi yang berbeda-beda tergantung dari pengalaman dan peran yang dijalankan berdasarkan kehidupan sehari-hari masing-masing para wanita tersebut. Makna-makna tersebut berbeda karena para wanita ini melihat dan menempatkan sikap serta sudut pandang mereka sebagai seorang anak, seorang wanita yang fokus pada peran ibu, dan seorang wanita yang berperan utama sebagai seorang istri. Secara umum, Ji Sun Woo di mata informan digambarkan sebagai sosok karakter wanita kuat, tapi penilaian makna yang lebih terperinci dibalik makna "wanita kuat" tersebut, ditemukan pemaknaan yang berbeda-beda bagi masing-masing informan. Hasil pemaknaan tersebut adalah buah dari sikap atau *Standpoint* yang didapatkan dari pengalaman latar belakang kehidupan informan, tingkat pendidikan, dan juga peran dominan yang dijalankan para wanita informan tersebut, walaupun mereka semua adalah wanita.

Penelitian terdahulu ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Rhesma Octavia dan Andri Prasetyo Yuwono pada tahun 2024. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui resepsi penonton terhadap makna normalisasi pelecehan seksual pada film ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan teknik analisis data melalui wawancara mendalam. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori analisis resepsi Stuart Hall dan teori *uses and effect*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lima adegan dalam film "Dear David" yang mengeksplorasi isu seksualitas, empat adegan didominasi oleh posisi hegemoni dominan, sementara satu adegan terakhir didominasi oleh posisi oposisi. Penelitian ini menghasilkan dua sudut pandang pada penonton. Pertama, sudut pandang positif meliputi nilai-nilai seperti tanggung jawab atas diri sendiri,

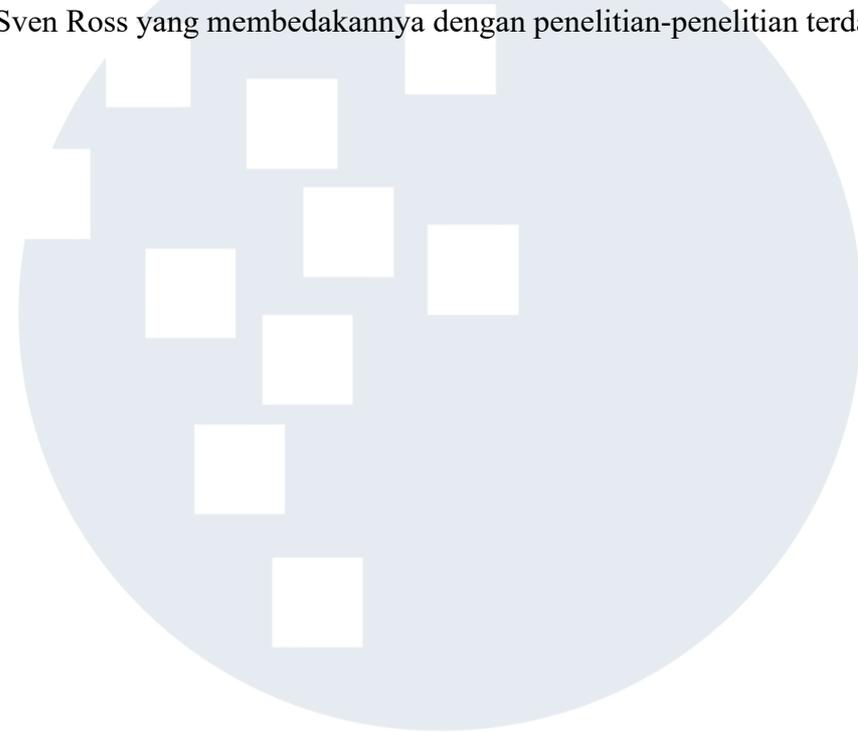
keberanian dalam memperjuangkan keadilan, kejujuran, peran orang tua dalam menghadapi masalah anak, menjaga privasi, dan meminta maaf jika melakukan kesalahan. Sementara itu, sudut pandang negatif dari film ini dapat mengakibatkan normalisasi pelecehan seksual bagi generasi muda, asalkan penonton tidak mampu menangkap pesan positifnya.

Penelitian terdahulu keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Valenia Melinda pada tahun 2023. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui resepsi bagaimana penerimaan penonton drama serial Thailand genre Boy's Love mengenai homoseksual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan landasan teori analisis resepsi Stuart Hall.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penonton memiliki pemahaman terhadap pesan yang disampaikan dalam drama serial "Boy's Love" Thailand tentang homoseksualitas. Ada tiga posisi penerimaan pesan yang dibagi: dominan, negosiasi, dan oposisi, dengan faktor utama penerimaan pesan adalah agama, status sosial, dan jenis kelamin. Pada posisi dominan, penonton sepenuhnya menerima pesan yang disampaikan, sesuai dengan latar belakang dan pengalaman hidup mereka terkait homoseksualitas. Posisi negosiasi menunjukkan penonton menerima pesan namun kadang-kadang menegosiasikan interpretasinya. Sedangkan posisi oposisi menunjukkan penolakan terhadap pesan yang bertentangan dengan pemahaman mereka tentang homoseksualitas, menggantikannya dengan makna lain sesuai dengan pengalaman pribadi mereka.

Penelitian terdahulu kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh Kevi Restu Pradhita dan Fajar Junaedi pada tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana resepsi audiens terhadap transgender dalam film dokumenter yang berjudul *Bulu Mata*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan landasan teori resepsi audiens dari Stuart Hall. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman penonton terhadap film "*Bulu Mata*" sangat bervariasi. Penonton dengan minat dalam isu gender cenderung mendominasi dalam pemaknaan, sementara mereka yang terlibat dalam organisasi film Kine cenderung berada dalam posisi bernegosiasi, dan yang terlibat dalam organisasi Rohis cenderung berada dalam posisi oposisi.

Maka dari itu, kebaharuan yang ada pada penelitian ini adalah penelitian ini mengangkat mengenai isu dunia politik yang masih jarang diangkat sebelumnya. Lalu penelitian ini juga menggabungkan teori resepsi Stuart Hall dengan tipologi milik Sven Ross yang membedakannya dengan penelitian-penelitian terdahulunya.



UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

Tabel 2. 1 Tabel Penelitian Terdahulu

Sumber: Olahan Data Peneliti (2024)

No	Judul	Nama Penulis	Metode Penelitian	Konsep/Teori	Hasil	Sumber
1	Analisis Resepsi Kelas Sosial Dalam Film "Crazy Rich Asians"	M. Raihan Taruna dan Ratna Permata Sari	Metode Kualitatif	Teori Resepsi Stuart Hall	<p>Hasil penelitian terkait analisis resepsi kelas sosial dalam film "Crazy Rich Asians" menunjukkan bahwa mayoritas responden sependapat bahwa perbedaan kelas sosial berpengaruh pada beberapa aspek kehidupan, seperti tradisi pernikahan, pendidikan, kekayaan, dan latar belakang keluarga. Walaupun begitu, sebagian responden menolak ide memilih pasangan berdasarkan latar belakang mereka. Responden yang sedang dalam tahap negosiasi mengalami kesulitan dalam menentukan keputusan terkait aspek budaya, latar belakang pasangan, dan jabatan.</p> <p>Perbedaan latar belakang responden memengaruhi cara mereka menafsirkan pesan-pesan dalam film tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa elemen-elemen seperti budaya, kekayaan, pendidikan, dan pekerjaan memiliki peran yang signifikan dalam cara kelas sosial dipahami terhadap film "Crazy Rich Asians".</p>	Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik, Vol. 2 No. 2, 2022

No	Judul	Nama Penulis	Metode Penelitian	Konsep/Teori	Hasil	Sumber
2	Resepsi Khalayak Wanita atas Karakter Ji Sun Woo dalam Drama Korea The World of the Married	Destaria Verani Soe'oad dan Prudensius Maring	Metode Kualitatif	Teori Resepsi Stuart Hall	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi dan pemaknaan atas karakter Ji Sun Woo oleh para informan berada di posisi yang berbeda-beda tergantung dari pengalaman dan peran yang dijalankan berdasarkan kehidupan sehari-hari masing-masing para wanita tersebut. Makna-makna tersebut berbeda karena para wanita ini melihat dan menempatkan sikap serta sudut pandang mereka sebagai seorang anak, seorang wanita yang fokus pada peran ibu, dan seorang wanita yang berperan utama sebagai seorang istri. Secara umum, Ji Sun Woo di mata informan digambarkan sebagai sosok karakter wanita kuat, tapi penilaian makna yang lebih terperinci dibalik makna "wanita kuat" tersebut, ditemukan pemaknaan yang berbeda-beda bagi masing-masing informan. Hasil pemaknaan tersebut adalah buah dari sikap atau <i>Standpoint</i> yang didapatkan dari pengalaman latar belakang kehidupan informan, tingkat pendidikan, dan juga peran dominan yang dijalankan para wanita informan tersebut, walaupun mereka semua adalah wanita.	WARTA Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, Vol. 3 No. 2, 2020
3	Analisis Resepsi Penonton terhadap	Rhesma Octavia dan Andri	Metode Kualitatif	Teori resepsi Stuart Hall	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lima adegan dalam film "Dear David" yang mengeksplorasi isu seksualitas, empat adegan didominasi oleh posisi hegemoni dominan, sementara satu adegan terakhir	Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 8 No. 1, 2024

No	Judul	Nama Penulis	Metode Penelitian	Konsep/Teori	Hasil	Sumber
	Makna Normalisasi Pelecehan Seksual pada Film Dear David	Prasetyo Yuwono			didominasi oleh posisi oposisi. Penelitian ini menghasilkan dua sudut pandang pada penonton. Pertama, sudut pandang positif meliputi nilai-nilai seperti tanggung jawab atas diri sendiri, keberanian dalam memperjuangkan keadilan, kejujuran, peran orang tua dalam menghadapi masalah anak, menjaga privasi, dan meminta maaf jika melakukan kesalahan. Sementara itu, sudut pandang negatif dari film ini dapat mengakibatkan normalisasi pelecehan seksual bagi generasi muda, asalkan penonton tidak mampu menangkap pesan positifnya.	
4	Analisis Resepsi Penonton Tayangan Drama Serial Thailand Genre Boy's Love Mengenai Homoseksual	Valenia Melinda	Metode Kualitatif	Teori Resepsi Stuart Hall	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penonton memiliki pemahaman terhadap pesan yang disampaikan dalam drama serial "Boy's Love" Thailand tentang homoseksualitas. Ada tiga posisi penerimaan pesan yang dibagi: dominan, negosiasi, dan oposisi, dengan faktor utama penerimaan pesan adalah agama, status sosial, dan jenis kelamin. Pada posisi dominan, penonton sepenuhnya menerima pesan yang disampaikan, sesuai dengan latar belakang dan pengalaman hidup mereka terkait homoseksualitas. Posisi negosiasi menunjukkan penonton menerima pesan namun kadang-kadang menegosiasikan interpretasinya. Sedangkan posisi oposisi menunjukkan penolakan terhadap pesan yang bertentangan dengan pemahaman mereka tentang homoseksualitas,	Jurnal Komunikasi dan Media, Vol. 3 No. 2, 2023

No	Judul	Nama Penulis	Metode Penelitian	Konsep/Teori	Hasil	Sumber
					menggantikannya dengan makna lain sesuai dengan pengalaman pribadi mereka.	
5	Resepsi Audiens Terhadap Transgender dalam Film Dokumenter Bulu Mata	Kevi Restu Pradhita dan Fajar Junaedi	Metode Kualitatif	Teori Resepsi Stuart Hall	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman penonton terhadap film "Bulu Mata" sangat bervariasi. Penonton dengan minat dalam isu gender cenderung mendominasi dalam pemaknaan, sementara mereka yang terlibat dalam organisasi film Kine cenderung berada dalam posisi bernegosiasi, dan yang terlibat dalam organisasi Rohis cenderung berada dalam posisi oposisi.	Channel Jurnal Komunikasi, Vol. 7 No. 2, 2019

UMMN

UNIVERSITAS

MULTIMEDIA

NUSANTARA

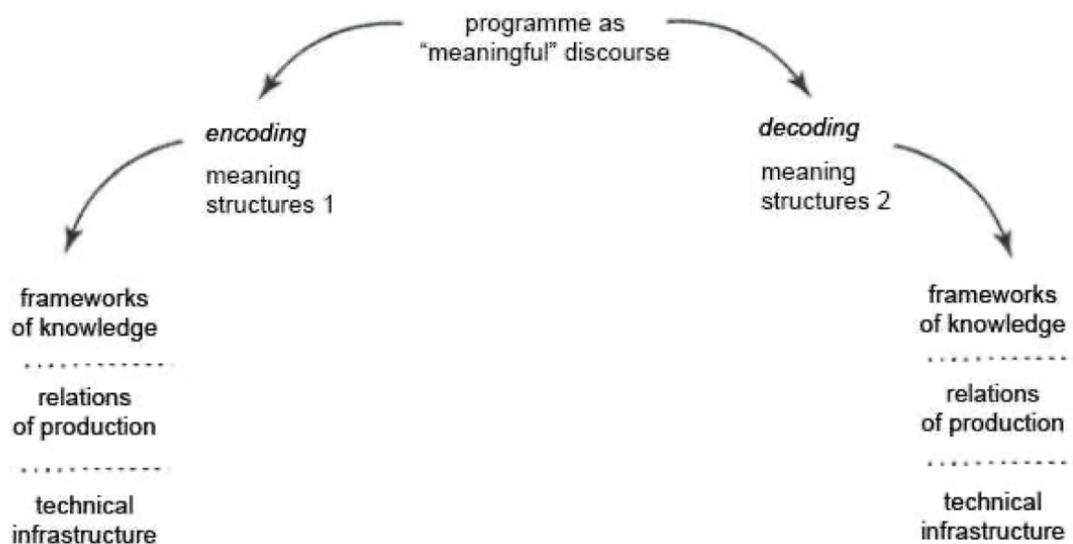
2.2 Landasan Teori atau Landasan Konsep yang digunakan

2.2.1 Teori Analisis Resepsi

Kerangka teori atau konsep merupakan upaya peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian secara teoretik. Pembahasan teori mencakup asumsi dasar, esensi teori, dan aplikasi teori dalam penelitian. Peneliti menjelaskan penggunaan teori dan konsep yang dipaparkan dalam konteks penelitian yang sedang dilakukan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori analisis resepsi Stuart Hall dengan tipologi encoding-decoding milik Sven Ross. Teori resepsi sendiri sebenarnya diperkenalkan oleh Stuart Hall dengan berfokus pada studi yang mengeksplorasi makna, produksi, dan pengalaman audiens atau penonton dalam interaksinya dengan teks media (Hall, 2019).

Teori ini menitikberatkan pada proses decoding (penerimaan pesan), interpretasi, serta pemahaman inti dari konsep analisis resepsi. Hall mengartikan komunikasi sebagai suatu proses di mana pesan disampaikan dan dipahami dengan dampak yang khusus. Proses ini melibatkan konsep encoding dan decoding, di mana pesan dikodekan oleh pengirimnya dan didekode oleh penerimanya. Dalam analisis resepsi encoding-decoding menurut Stuart Hall, audiens dipandang sebagai individu yang mampu menginterpretasikan pesan dengan makna yang bervariasi. Makna yang ditafsirkan oleh audiens dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemikiran mereka sendiri (Hall, 2019).

Menurut teori resepsi dari Stuart Hall, proses encoding-decoding melibatkan bagaimana audiens menerima dan kemudian mereproduksi pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan (Hall, 2019). Berikut ini adalah penjelasan mengenai proses encoding-decoding menurut Stuart Hall:



Gambar 2.1 Stuart Hall's model of encoding-decoding

Sumber: Buku Budaya, Media, Bahasa (2019)

Hall (2019) menjelaskan bahwa komunikasi adalah proses pembentukan makna dan pesan melalui kode atau tanda. Dalam proses ini, terdapat dua momen penting, yaitu encoding dan decoding. Encoding dan decoding melibatkan frameworks of knowledge, relation of production, dan technical infrastructure seperti pada gambar 2.2. Namun, Hall menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara makna dalam struktur makna 1 dan struktur makna 2, karena makna tidak selalu sama atau diskursif. Kode encoding dan decoding tidak selalu berbentuk simetris secara sempurna.

Pada gambar di atas, terdapat dua struktur makna dalam proses encoding dan decoding menurut Stuart Hall, yang dipengaruhi oleh frameworks of knowledge, relations of production, dan technical infrastructure. Pada struktur makna 1, teori resepsi Stuart Hall menunjukkan bahwa pesan yang dikodekan dipengaruhi oleh proses produksi. Ini terlihat dari faktor technical infrastructure, yang meliputi infrastruktur besar dalam proses produksi seperti kamera, latar tempat dan suasana, studio, pencahayaan, dan lain-lain, untuk mendukung pesan yang ingin disampaikan oleh tim produksi. Faktor relations of production mencakup

kru yang terlibat, mulai dari produser, editor, hingga teknisi lain yang membantu proses produksi suatu program televisi (Hall, 2019).

Pada struktur makna 2, audiens menafsirkan pesan yang disampaikan oleh tim produksi dalam suatu program televisi. Faktor *framework of knowledge* terlihat pada sisi audiens, yang memiliki kerangka pengetahuan berbeda-beda yang mempengaruhi pemaknaan mereka terhadap pesan dalam program televisi. Hall juga mengakui adanya ketidaksimetrian antara pemahaman tim produksi sebagai sumber tanda dan penafsiran audiens sebagai penerima pesan (Hall, 2019).

Selain itu, Hall menjelaskan bahwa tingkat simetri dalam teori ini mengacu pada tingkat kesalahpahaman dan salah tafsir dalam pertukaran pesan dalam proses komunikasi, yang bergantung pada hubungan kesetaraan (simetris atau asimetris) antara kumpulan pesan *encoder* dan *decoder*. Posisi *encoder* dan *decoder* dapat diartikan sebagai pengirim pesan dan penerima pesan (Hall, 2019). Hall menjelaskan bahwa resepsi melibatkan proses *decoding* oleh penonton dalam media, di mana audiens mengartikan dan memaknai pesan melalui tiga sudut pandang atau posisi. Oleh karena itu, Hall (2019) mengidentifikasi tiga posisi bagaimana audiens dapat melakukan *decoding* sebuah pesan, yaitu:

A. Dominant hegemonic

Audiens menafsirkan atau memaknai pesan sesuai dengan makna yang diinginkan oleh pengirim pesan (*preferred reading*). Audiens ini dianggap ideal karena setiap individu dalam kelompok ini memiliki pemahaman kode yang lebih dominan dan kuat dibandingkan kode lainnya.

B. Negotiated

Posisi ini dikenal sebagai *negosiasi*, di mana audiens dapat menerima pesan namun juga menolak beberapa aspek dari pesan dan makna yang disampaikan oleh media. Audiens dalam kategori ini mampu menerima ideologi dominan dari pengirim pesan, tetapi mereka juga merespons dengan berbagai pertimbangan pribadi.

C. Oppositional

Posisi ini menggambarkan audiens dengan sudut pandang kritis, yang melihat pesan sebagai sesuatu yang kontradiktif dan tidak menerima makna secara langsung dari media. Mereka cenderung menafsirkan atau memaknai pesan sesuai dengan pemikiran mereka sendiri, berbeda dari apa yang dimaksudkan oleh pengirim pesan.

Namun sayangnya, masih ada beberapa hal yang belum terselesaikan dari teori resepsi milik Stuart Hall ini. Maka dari itu, sejak Hall memperkenalkan model *encoding/decoding* pada tahun 1973, ada banyak peneliti telah mengembangkan model tersebut. Salah satunya adalah Sven Ross. Tipologi yang dikembangkan oleh Ross bertujuan untuk melengkapi kekurangan model *encoding/decoding* Hall yang telah dikritik oleh peneliti lain sebelumnya. Ross mengembangkan tipologinya berdasarkan dua kritik utama terhadap model Hall. Kritik pertama adalah asumsi Hall bahwa pesan media selalu dikodekan dalam kerangka ideologi dominan atau dominan-hegemonik (Ross, 2011). Oleh karena itu, Ross menghadirkan kerangka pengodean alternatif. Pengodean ini didasarkan pada pemisahan tiga posisi pemaknaan Hall: dominan, negosiasi, dan oposisi. Dalam posisi encoding Ross, teks berita yang sejalan dengan ideologi dominan dikategorikan sebagai dominant-hegemonic encoding. Teks berita dengan pesan ideologis yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ideologi dominan masuk dalam kategori negotiated encoding, atau teks dengan sebagian pesan kritis. Sementara itu, teks berita dengan pesan ideologi yang berlawanan dengan ideologi dominan dikategorikan sebagai oppositional encoding atau teks radikal (Ross, 2011).

Kritik kedua adalah kurangnya kejelasan apakah posisi pemaknaan Hall ditentukan oleh ideologi atau hanya kesepakatan terhadap isi berita. Ross menganggap garis batas yang buram ini sebagai masalah (Ross, 2011). Ross merujuk pada Morley (dalam Ross, 2011) mengenai perlunya memisahkan antara memahami dan menyetujui isi teks berita dengan menyetujui pesan ideologis yang terkandung di dalamnya.

Maka dari itu, Ross pun mengembangkan dua tipologi yang berbeda untuk posisi pemaknaan. Tipologi pertama bertujuan untuk menilai posisi pemaknaan

berdasarkan ideologi, sementara tipologi kedua untuk menilai posisi pemaknaan berdasarkan persetujuan terhadap teks berita itu sendiri. Kedua tipologi Ross ini memuat pemisahan antara dominan, negosiasi, dan oposisi. Ross kemudian melakukan tabulasi silang antara posisi encoding dan *decoding*. Hasilnya adalah tipologi yang kompleks terdiri dari sembilan kombinasi posisi encoding dan *decoding* yang berbeda. Meluaskan pemahaman posisi encoding ke dalam kerangka ini mungkin lebih sesuai untuk teks berita yang tidak dikemas dalam kerangka ideologi dominan (Ross, 2011).

		ENCODING POSITIONS		
		Dominant-hegemonic encoding (Hall's assumed mode)	Negotiated encoding (partly critical text)	Oppositional encoding (a radical text)
DECODING POSITIONS (ideological)	Dominant-hegemonic position	Dominant-hegemonic reading of dominant-hegemonic text	Dominant-hegemonic reading of negotiated text <i>=Neutralization</i>	Dominant-hegemonic reading of oppositional text <i>=Neutralization</i>
	Negotiated position	Negotiated reading of dominant-hegemonic text	Negotiated reading of negotiated text	Negotiated reading of oppositional text
	Oppositional position	Oppositional reading of dominant-hegemonic text	Oppositional reading of negotiated text <i>=Amplification of critique</i>	Oppositional reading of oppositional text <i>=Agreement with oppositional text</i>

Gambar 2. 2 Tipologi berdasarkan Ideologi

Sumber: The Encoding/Decoding Model Revisited (2011)

Ross menggunakan tipologi posisi pemaknaan berdasarkan ideologi untuk menilai bagaimana pembaca memahami pesan media. Ross mempertimbangkan apakah pemaknaan pembaca sejalan, sebagian sejalan, atau bertentangan dengan ideologi dominan dalam masyarakat. Jika pembaca memahami berita sesuai dengan ideologi dominan, mereka berada dalam posisi dominant-hegemonic. Jika pembaca memahami berita dengan sebagian persetujuan terhadap ideologi dominan, mereka berada dalam posisi negotiated. Sedangkan jika pembaca memahami berita dalam

konteks oposisi terhadap ideologi dominan, mereka berada dalam posisi oppositional (Ross, 2011).

Pendekatan ini melibatkan analisis posisi ideologi yang terkandung dalam pesan media. Dengan demikian, pesan media yang dikodekan dalam kerangka ideologi dominan atau dominan-hegemonik dapat diterjemahkan sebagai oposisional oleh pembaca, dan sebaliknya. Pesan media yang dikodekan dengan cara yang bertentangan dengan ideologi dominan juga dapat dianalisis dari sudut pandang ideologi dominan (Ross, 2011).

		ENCODING POSITIONS		
		Dominant-hegemonic encoding (Hall' assumed mode)	Negotiated encoding (partly critical text)	Oppositional encoding (radical text)
DECODING POSITIONS (text-relative)	Text-accepting position	Text-acceptance of dominant-hegemonic text	Text-acceptance of negotiated text	Text-acceptance of oppositional text
	Text-negotiation position	Negotiation of dominant-hegemonic text	Negotiation of negotiated text	Negotiation of oppositional text
	Text-oppositional position	Text-oppositional reading of dominant-hegemonic text	Text-oppositional reading of negotiated text	Text-oppositional reading of oppositional text = <i>Neutralization</i>

Gambar 2. 3 Tipologi berdasarkan Text-relative

Sumber: The Encoding/Decoding Model Revisited (2011)

Tipologi posisi pemaknaan berdasarkan 'text-relative' utamanya mempertimbangkan bagaimana pembaca memahami teks berita berdasarkan persetujuan mereka terhadap teks itu sendiri. Oleh karena itu, Ross menambahkan istilah "text" dalam baris posisi decoding untuk membedakan pendekatan ini dari pendekatan berdasarkan ideologi (Ross, 2011). Dengan demikian, dalam kedua tipologi Ross ini, pembaca mungkin mengambil posisi yang bertentangan secara ideologis, tetapi dalam konteks text-relative, mereka mungkin berada dalam posisi dominan atau negosiasi. Penting untuk dicatat bahwa tipologi Ross memiliki batasannya. Ross (2011) mencatat bahwa tipologinya tidak bisa dijadikan sebagai

model komunikasi umum yang bisa menjawab semua jenis pertanyaan penelitian. Tipologi ini mungkin tidak efektif ketika diterapkan pada subjek di mana ideologi bukanlah fokus utama.

Maka dari itu, studi resepsi bertujuan untuk menjelaskan bagaimana individu memahami dan merespons pesan yang mereka terima. Pendekatan ini membandingkan perspektif audiens dengan pesan yang disampaikan oleh media. Namun, pengirim pesan tidak dapat dengan pasti menciptakan makna yang dikehendaki karena hal tersebut bergantung pada nilai-nilai, latar belakang pribadi, dan cara berpikir yang berbeda di antara individu-individu. Pada penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat menunjukkan bagaimana respon Generasi Z dalam menerima isu kecurangan Pemilu pada film “Dirty Vote”. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tipologi encoding/decoding Ross untuk menentukan posisi pemaknaan pembaca dari kesepakatan pembaca terhadap teks berita.

2.2.2 Kecurangan Pemilu

Kecurangan pemilu adalah tindakan ilegal yang dilakukan untuk mengubah hasil pemilu demi keuntungan pihak tertentu. Tindakan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menyuap pemilih agar memilih kandidat tertentu atau tidak memilih kandidat lain, memaksa pemilih untuk memilih kandidat tertentu, memalsukan surat suara atau menghitung suara secara tidak sah, menghalangi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, menyebarkan informasi bohong atau propaganda untuk memengaruhi pemilih (Bawaslu, 2017).

Kecurangan pemilu dapat merusak demokrasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. Oleh karena itu, penting untuk mencegah dan menangani kecurangan pemilu dengan tegas dan adil.

Beberapa contoh modus kecurangan pemilu yang paling sering terjadi adalah politik uang dengan cara memberikan uang atau barang kepada pemilih agar memilih kandidat tertentu, kampanye hitam dengan melakukan serangan pribadi terhadap kandidat lawan atau menyebarkan informasi bohong tentang mereka, penghitungan suara yang tidak sah dengan memalsukan hasil penghitungan suara

atau memanipulasi data, serta intimidasi pemilih dengan menakut-nakuti pemilih agar tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih kandidat tertentu (Bawaslu, 2017).

Penanganan kecurangan pemilu di Indonesia dilakukan oleh beberapa pihak, seperti Bawaslu yang bertugas mengawasi proses pemilu dan menangani dugaan pelanggaran pemilu, KPU yang bertugas menyelenggarakan pemilu dan menetapkan hasil pemilu, kepolisian yang bertugas menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilu yang bersifat pidana, dan Mahkamah Konstitusi yang bertugas menyelesaikan sengketa hasil pemilu (Bawaslu, 2017).

Undang-Undang tentang kecurangan pemilu di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, terutama dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) (Tanahlautkab, 2020). Berikut adalah beberapa poin penting yang diatur dalam UU Pemilu terkait dengan kecurangan pemilu:

1. Pengaturan Umum dan Prinsip Pemilu:

Pasal 1 ayat (2) menjelaskan prinsip-prinsip umum pemilu yang bebas, rahasia, jujur, dan adil.

2. Larangan dan Sanksi Terkait Pelanggaran:

- Pelanggaran administratif: Pasal 510 hingga Pasal 521 memuat ketentuan mengenai pelanggaran administratif, termasuk ketidakakuratan daftar pemilih, penggunaan fasilitas negara, dan pelanggaran kampanye.
- Pelanggaran pidana: Pasal 488 hingga Pasal 505 menjelaskan berbagai bentuk tindak pidana pemilu, seperti pemberian atau penerimaan suap, intimidasi, dan penggelembungan suara. Misalnya, Pasal 488 mengatur tentang pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja memberikan atau

menjanjikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

3. Penyelesaian Sengketa Pemilu:

- Bawaslu: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki wewenang untuk mengawasi proses pemilu dan menindak pelanggaran yang terjadi. Bawaslu dapat memberikan rekomendasi sanksi administratif dan melaporkan dugaan tindak pidana pemilu kepada pihak berwenang.
- Penegakan Hukum: Pelanggaran pidana pemilu diproses melalui sistem peradilan pidana, dengan melibatkan Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

4. Peran Masyarakat:

Pasal 448 hingga Pasal 454 memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemilu, termasuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu.

Contoh spesifik dari pasal-pasal UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait dengan kecurangan pemilu adalah sebagai berikut:

- Pasal 515: Mengatur tentang larangan memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihannya.
- Pasal 523: Mengatur sanksi bagi peserta pemilu atau tim kampanye yang memberikan janji atau hadiah kepada pemilih.
- Pasal 532: Mengatur tentang larangan bagi pejabat negara untuk menggunakan fasilitas negara dalam kampanye.

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut dapat berujung pada sanksi administratif, pidana, atau diskualifikasi dari pemilu (Tanahlautkab, 2020).

Selain Undang-Undang di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) juga memiliki beberapa peraturan yang mengatur tentang kecurangan pemilu (Bawaslu, 2022), antara lain:

1. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum

Peraturan ini mengatur tentang:

- Penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu, termasuk kecurangan.
- Tata cara penerimaan, penelaahan, dan pelimpahan temuan dan laporan pelanggaran pemilu.
- Pembentukan dan tugas Tim Pemeriksa Fakta (TPF).
- Penanganan hasil pemeriksaan TPF.
- Pengawasan proses penyelesaian sengketa pemilu di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

2. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum

Peraturan ini mengatur tentang:

- Penyelesaian dugaan pelanggaran administratif pemilu dan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM.
- Pembentukan dan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (SPHT).
- Tata cara penyelesaian dugaan pelanggaran administratif pemilu dan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM.
- Pengawasan proses penyelesaian pelanggaran administratif pemilu di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

3. Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, TNI, Polri, dan Penyelenggara Pemilu

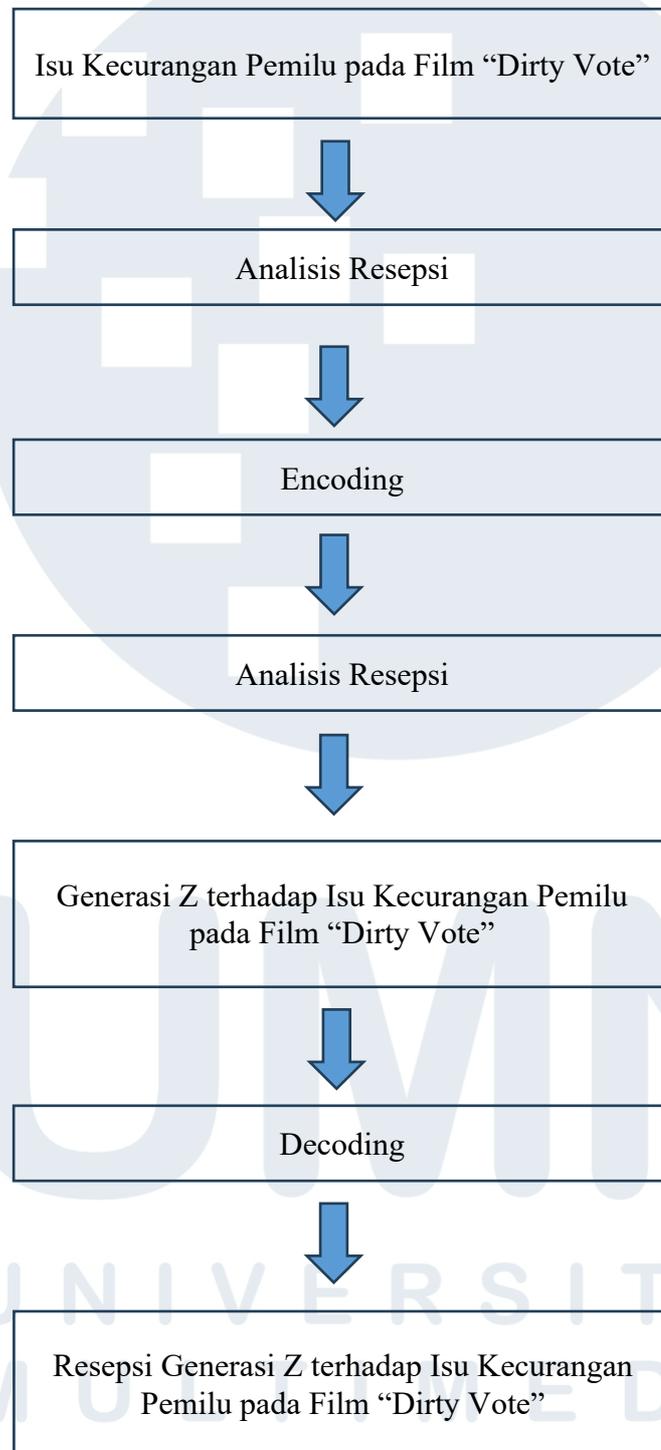
Peraturan ini mengatur tentang:

- Pencegahan dan penanganan pelanggaran netralitas pegawai ASN, TNI, Polri, dan penyelenggara pemilu.
- Pembentukan dan tugas Tim Terpadu Penanganan Pelanggaran Netralitas (Tim Terpadu).
- Tata cara pencegahan dan penanganan pelanggaran netralitas.
- Pengawasan proses pencegahan dan penanganan pelanggaran netralitas

UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

2.3 Alur Penelitian



Gambar 2.4 Alur Penelitian

Sumber: Olahan Data Peneliti (2024)